

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANK SAMPAH DI KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG

Narwastu Widyan Suryaning Asri, Hartuti Purnaweni

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Email: narwastuwidyan@gmail.com

ABSTRAK

Sampah menjadi salah satu isu krusial yang sedang dihadapi Kota Semarang. Dalam mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Semarang menggalakkan pendirian bank sampah di setiap kelurahan, salah satunya adalah di Kelurahan Pedurungan Kidul. Dalam pelaksanaannya, setiap bank sampah pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan mengacu pada empat aspek menurut Kementerian Pekerjaan Umum RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-komparatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pengurus dan nasabah dua Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu faktor pendukung yaitu kelembagaan dan tiga faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan komunikasi. Lebih banyaknya faktor penghambat selanjutnya berakibat pada belum optimalnya kinerja bank sampah. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan diversifikasi media sosial sebagai strategi komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, dan masyarakat.

Kata kunci: Sampah, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah

**EVALUATION OF WASTE BANK PROGRAM IMPLEMENTATION IN PEDURUNGAN
KIDUL VILLAGE, PEDURUNGAN SUB-DISTRICT, SEMARANG CITY**

ABSTRACT

Waste is one of the crucial issues facing the city of Semarang. In overcoming this, the Semarang City Government is promoting the establishment of waste banks in every kelurahan, one of which is in Pedurungan Kidul Village. In practice, every waste bank must be influenced by several factors that support or hinder the performance of the waste bank. This study aims to analyze the supporting factors and inhibiting factors that affect the implementation of the Waste Bank Program in Pedurungan Kidul Village with reference to four aspects according to the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative methods with descriptive-comparative research design. Data were obtained from observations and interviews with administrators and customers of two Waste Banks in Pedurungan Kidul Village, Pedurungan District, Semarang City. The results showed that there was one supporting factor, namely institutional and three inhibiting factors, namely human resources, facilities and infrastructure, and communication. More inhibiting factors then result in the non-optimal performance of the waste bank. The recommendation that can be given is to diversify social media as a communication strategy between the Environment Agency, the Waste Bank, and the community.

Keywords: Waste, Waste Management, Waste Bank

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki angka kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2018-2020 terangkum dalam Tabel 1

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Semarang (2018-2020)

Tahun	Jumlah Penduduk
2018	1.668.578
2019	1.674.358
2020	1.685.909

Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2020)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya jumlah penduduk ditambah semakin pesatnya perkembangan industri dan perdagangan di Kota Semarang menjadi penyebab tingginya jumlah sampah di kota ini.

Kota Semarang menduduki peringkat ketiga wilayah penghasil sampah terbesar se-Jawa Tengah dengan produksi sampah mencapai 1200 ton per hari (Rahmayani, 2021). Dari jumlah tersebut, sekitar 850 hingga 900 ton sampah langsung dibuang ke TPA Jatibarang sementara jumlah maksimum yang dapat diolah menjadi kompos hanya sebesar 150 ton atau sekitar 10% dari total sampah Kota Semarang (Purnaweni, 2017). Angka ini menunjukkan bahwa Kota Semarang sedang mengalami darurat sampah.

Dalam upaya mengatasi fenomena ini, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup mengencarkan pendirian Bank Sampah sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Semarang (Setiadi, 2020). Bank sampah bekerja dengan menerapkan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang dimulai dari lingkup yang paling kecil yakni rumah tangga. Sistem ini akan mendorong masyarakat untuk berkontribusi penuh dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga bank sampah dianggap sebagai solusi paling efektif dalam mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA Jatibarang dengan target bahwa bank sampah mampu mengurangi presentase sampah di TPA Jatibarang sebesar 30%.

Dinas Lingkungan Hidup menargetkan bahwa setiap kelurahan memiliki setidaknya 1 bank sampah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat setempat (Wicaksono, 2020). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, hingga tahun 2019 tercatat bahwa Kota Semarang memiliki 57 bank sampah yang tersebar di beberapa wilayah, salah satunya adalah Kelurahan Pedurungan Kidul.

Berdasarkan data DLH Kota Semarang, Kelurahan Pedurungan Kidul menjadi wilayah dengan jumlah bank sampah terbanyak se-Kecamatan Pedurungan. Terdapat dua bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, yakni Bank Sampah Aisah dan Bank Sampah Mekar Jaya. Keduanya telah beroperasi selama lebih dari 3 tahun dan saat ini telah memiliki lebih dari 50 nasabah.

Secara keseluruhan, kedua bank sampah memiliki sistem kerja yang hampir sama selayaknya bank sampah pada umumnya namun terdapat sedikit perbedaan dalam hal fokus layanan bank sampah. Saat ini, Bank Sampah Mekar Jaya masih berada di tahap pengedukasian kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan belum berfokus pada penggalakkan daur ulang sampah. Sementara itu, Bank Sampah Aisah rutin melakukan daur ulang sampah yang selanjutnya akan dipasarkan pada saat pameran.

Apabila melihat jumlah ini maka seharusnya Kelurahan Pedurungan Kidul menjadi wilayah dengan sistem pengelolaan sampah terbaik se-Kecamatan Pedurungan. Namun, sebagaimana dikutip dari (Bahana, 2018), secara keseluruhan masyarakat di Kecamatan Pedurungan cenderung skeptis terhadap pemilahan sampah karena menganggap bahwa sampah yang telah dipilah dipilah nantinya tetap akan bercampur di TPA.

Selain itu, sebagaimana dikutip dari artikel "*Tiga Kendala Ini Sebabkan Rendahnya Upaya Pemilahan Sampah di Indonesia*" (Setiadi, 2020), apabila ditinjau secara menyeluruh, Bank Sampah belum bekerja secara optimal dalam upaya pengurangan sampah di Kota Semarang karena beberapa hal, yang meliputi: (1) Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pemilahan sampah merupakan kegiatan yang sia-sia; (2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Bank Sampah; (3) Bank sampah tidak dikelola oleh tenaga yang profesional. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu apakah bank

sampah dapat bekerja dengan optimal dan mampu mencapai tujuannya.

Sama halnya dengan bank sampah lain, dalam keberjalanannya, kedua bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor pendukung maupun penghambat, yang berasal dari internal maupun eksternal bank sampah. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai "Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul?"

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik dapat didefinisikan proses formulasi, implementasi, dan pengelolaan kebijakan publik sebagai upaya pengorganisasian badan pemerintahan (Chandler & Plano *dalam* Keban, 2008: 3). Sementara itu, Pfiffner dan Presthus (*dalam* Syafie, 2006) mendefinisikan administrasi publik sebagai usaha individu maupun kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Dengan kata lain, administrasi publik dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan pemerintah.

2. Kebijakan Publik

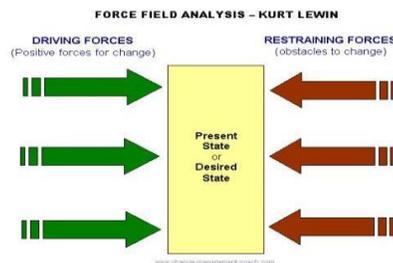
Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat peluang dan hambatan (Friedrich *dalam* Agustino, 2008: 186). Kebijakan dapat juga didefinisikan sebagai segala keputusan yang diambil pemerintah untuk

melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu (Thomas Dye dalam Subarsono, 2013). Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik.

3. Force Field Analysis

Force Field Analysis merupakan suatu metode analisis yang dikembangkan oleh Kurt Lewin dan bertujuan untuk menganalisis kekuatan yang dapat mempengaruhi situasi dan menyebabkan perubahan ke arah positif (Narayanamy dalam Adhanita, 2013).

Gambar 1.1
Force Field Analysis



Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kekuatan ataupun hambatan yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi ataupun pencapaian tujuan organisasi (Purwanto, 2018). *Force Field Analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dan membedakan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bank Sampah dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam memudahkan proses identifikasi kekuatan pendorong maupun penghambat, penelitian ini berpedoman pada empat aspek berdasarkan Petunjuk Teknis TPS 3R

(Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2017), yang meliputi: (1) Sumber daya manusia, mencakup pengetahuan pengelola maupun nasabah bank sampah, dan partisipasi masyarakat; (2) Kelembagaan, mencakup regulasi dan struktur organisasi bank sampah; (3) Sarana dan prasarana penunjang, dilihat melalui tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana; (4) Komunikasi, dilihat melalui sosialisasi mengenai bank sampah kepada masyarakat.

4. Pengelolaan Sampah 3R

Pengelolaan sampah berbasis 3R merupakan salah satu strategi pengelolaan sampah yang diambil oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat. Seperti dikutip dari Modul Pengolahan Sampah Berbasis 3R (Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2010: 5), 3R terdiri atas:

- a. *Reduce*: Menitikberatkan pada upaya pencegahan penumpukan sampah melalui pengurangan bahan sekali pakai. *Reduce* dapat dilakukan dengan mengganti plastik dengan kertas atau daun dan mengurangi produksi makanan dan minuman kemasan
- b. *Reuse*: Menitikberatkan pada pemanfaatan kembali bahan sampah melalui penggunaan berulang untuk fungsi yang sama maupun berbeda. Contoh dari *reuse* adalah penggunaan ember bekas menjadi pot bunga, memanfaatkan koran menjadi pembungkus.
- c. *Recycle*: Menitikberatkan pada pemanfaatan kembali sampah namun melalui proses daur ulang terlebih dahulu. Contoh dari *recycle* adalah daur ulang sampah organik menjadi kompos dan pengolahan plastik kemasan menjadi tas.

5. Bank Sampah

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah, Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang bernilai ekonomi untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang. Umumnya, sampah yang dikelola oleh bank sampah adalah sampah anorganik karena cenderung lebih sulit membusuk serta memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding sampah organik. Bank Sampah menawarkan manfaat lingkungan dan ekonomi dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dengan menerapkan konsep menabung sampah. Sistem penabungan di Bank Sampah sama dengan bank pada umumnya, dan bahkan anggota Bank Sampah juga disebut sebagai nasabah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan mengacu pada empat indikator berdasarkan "Petunjuk Teknis TPS 3R". Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-komparatif. Lokasi penelitian adalah pada Bank Sampah Mekar Jaya dan Bank Sampah Aisah. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan 5 informan yang terdiri atas Pengurus dan Nasabah Bank Sampah Mekar Jaya serta Pengurus dan Nasabah Bank Sampah Aisah. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, artinya bahwa peneliti memilih informan yang dianggap memahami informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik analisis dan interpretasi data terdiri atas pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. PEMBAHASAN

Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul telah beroperasi sejak tahun 2011, yang juga merupakan tahun saat Bank Sampah Aisah berdiri. Selama keberjalanannya, tentunya terdapat beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan dan kinerja bank sampah. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor pendorong maupun penghambat yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Sampah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga faktor penghambat dan satu faktor pendukung pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan rincian sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

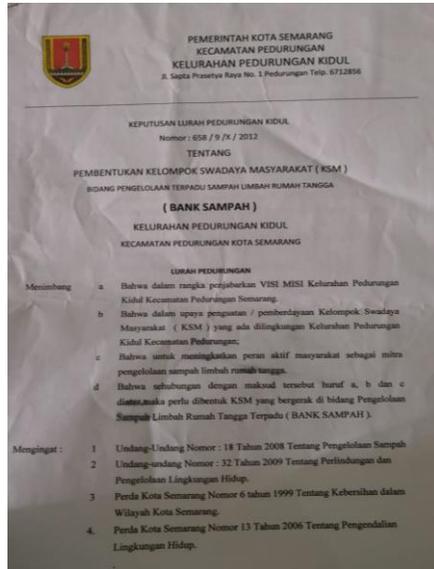
Faktor pendukung pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul adalah aspek kelembagaan yang meliputi regulasi dan struktur organisasi.

Saat ini, telah terdapat regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang mengatur keberadaan bank sampah. Pada tingkat pusat, bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah yang didalamnya memuat definisi beserta pedoman pelaksanaan bank sampah. Sementara itu, pada tingkat daerah bank sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Apabila dilihat secara lebih mengerucut, keberadaan kedua bank sampah yang terletak di Kelurahan Pedurungan Kidul telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Dinas Lingkungan

Hidup yang dikeluarkan melalui kelurahan setempat.

Gambar 2.1
Surat Keterangan Bank Sampah



Sumber: Dokumentasi penulis

Surat Keputusan tersebut menjamin keberadaan kedua bank sampah dan memberikan kesempatan bagi bank sampah untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ataupun mengajukan bantuan operasional kepada DLH Kota Semarang.

Di samping regulasi, saat ini kedua bank sampah telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan dua Seksi. Adanya struktur organisasi memperjelas kedudukan, tugas, dan fungsi dari masing-masing pengurus sehingga menghindari adanya tumpang tindih tupoksi namun saat ini terdapat sedikit perbedaan antara keduanya yang dipengaruhi oleh perbedaan fokus dan tujuan masing-masing bank sampah.

“Saat ini kami belum memiliki seksi kreasi karena kami masih berfokus pada edukasi mengenai pemilahan sampah dan belum melakukan

daur ulang sampah” (Wawancara dengan Penanggung Jawab Bank Sampah Mekar Jaya)

Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam hal struktur organisasi namun secara keseluruhan seluruh pengurus bank sampah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Faktor Penghambat

2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aspek penting yang sangat mempengaruhi kinerja bank sampah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Bank Sampah, SDM yang berperan adalah pengurus serta nasabah bank sampah.

Saat ini, seluruh pengurus bank sampah telah memahami konsep dan sistem kerja bank sampah, namun masih terdapat sebagian nasabah yang belum memahami konsep bank sampah. Beberapa nasabah menganggap bahwa Bank Sampah sama dengan Tempat Penampungan Sampah sehingga mereka menyetorkan sampah tanpa dipilah terlebih dahulu.

“Sebagian nasabah memang sudah paham kalau bank sampah merupakan tempat pemilahan sampah tetapi masih ada juga yang datang ke sini dengan membawa satu kantong sampah yang masih bercampur” (Wawancara dengan Penanggung Jawab Bank Sampah Aisah)

Selain itu, hingga saat ini tingkat partisipasi warga dalam pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh DLH Kota Semarang maupun Bank Sampah masih tergolong rendah. Fenomena yang sering terjadi adalah hanya pengurus atau orang-orang tertentu saja yang rutin mengikuti pelatihan bahkan beberapa dari peserta pelatihan

hanya berpartisipasi sebagai formalitas sehingga tidak mampu menerapkan ilmu yang didapat untuk memajukan bank sampah.

2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana menjadi faktor penting yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja bank sampah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa terdapat ketimpangan sarana prasarana antara kedua bank sampah yang ada di Kelurahan Pedurungan Kidul.

Saat ini, tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bank Sampah Mekar Jaya telah mencapai 100%. Bank Sampah Mekar Jaya mendapat insentif dari Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan gedung, pembelian kebutuhan operasional, serta inventaris yang diperlukan seperti timbangan, komputer, lemari, motor, dan sebagainya.

“Secara keseluruhan sarana prasarana di sini sudah lengkap dan sudah mencapai 100%”

(Wawancara dengan Penanggung Jawab Bank Sampah Mekar Jaya).

Di samping itu, Bank Sampah Mekar Jaya juga mendapat bantuan dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) berupa buku tabungan nasabah dan buku tabungan induk.

Gambar 2.2
Bank Sampah Mekar Jaya



Sumber: Dokumentasi penulis

Sementara itu, saat ini Bank Sampah Aisah lebih banyak mengandalkan dana yang bersumber dari internal bank sampah dalam pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana. Dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan sampah.

“Pada waktu itu kami sempat mendapat timbangan kecil dari kelurahan, sisanya seperti alat tulis dan alat kerjainan kamu sediakan secara mandiri” (Wawancara dengan Penanggung Jawab Bank Sampah Aisah).

Hingga saat ini, tingkat pemenuhan kebutuhan Bank Sampah Aisah mencapai 70%.

Gambar 2.3
Bank Sampah Aisah



Sumber: Dokumentasi penulis

Saat ini, Bank Sampah Aisah telah berupaya mengajukan bantuan berupa motor kepada DLH yang akan digunakan untuk menjemput sampah ke rumah-rumah nasabah guna mengumpulkan lebih banyak sampah dan menjangkau lebih banyak warga. Adanya perbedaan mengenai tingkat pemenuhan sarana dan prasarana ini kemudian mempengaruhi tingkat kinerja masing-masing bank sampah.

2.3. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam penelitian ini ditinjau dari bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh bank sampah kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Bank Sampah Mekar Jaya dan Bank Sampah Aisah dalam aspek komunikasi.

Bank Sampah Mekar Jaya rutin melakukan sosialisasi mengenai keberadaan bank sampah atau sistem kerja bank sampah setiap satu bulan sekali pada pertemuan PKK RW. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan ke setiap RT melalui *Whatsapp Group*. Sama halnya dengan Bank Sampah Mekar Jaya, Bank Sampah Aisah juga telah melakukan sosialisasi kepada warga namun kegiatan sosialisasi hanya dilakukan sekitar satu atau dua kali dalam satu tahun.

“Kami biasanya melakukan sosialisasi lewat PKK tetapi hanya sekitar 2 kali dalam satu tahun”
(Wawancara dengan Penanggung Jawab Bank Sampah Aisah)

Selain itu, kedua bank sampah belum memiliki media sosial yang memuat informasi mengenai profil dan kegiatan

bank sampah. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang mahir mengoperasikan media sosial padahal media sosial dapat menjadi sarana efektif dalam mengenalkan bank sampah kepada masyarakat dalam rangka memperluas jangkauan bank sampah.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, diperoleh bahwa hanya terdapat 1 faktor yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan program yakni kelembagaan, yang meliputi regulasi dan struktur organisasi. Sementara itu, terdapat tiga faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program, yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan komunikasi. Ketiga aspek tersebut merupakan faktor utama atau fondasi yang secara langsung memberi pengaruh besar bagi pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul. Lebih banyaknya faktor penghambat dibanding pendukung selanjutnya berakibat pada belum optimalnya kinerja Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul dalam rangka pencapaian tujuannya.

3.2. Saran

Dari faktor pendukung yang ditemukan, yakni pada aspek regulasi dan struktur organisasi, maka bank sampah perlu untuk senantiasa melakukan monitoring terhadap kinerja masing-masing pengurus serta memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka kemajuan bank sampah.

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam bank sampah serta belum terpenuhinya sarana operasional bank sampah. Dalam meminimalisir faktor penghambat tersebut, bank sampah dapat memperbaiki pola komunikasi melalui diversifikasi media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan bank sampah sebagai media edukasi mengenai konsep bank sampah secara umum sekaligus memperkenalkan profil bank sampah kepada masyarakat umum. Selain itu, media sosial dapat digunakan sebagai sarana bagi bank sampah untuk memasarkan produk daur ulang sampah dengan harapan akan meningkatkan pendapatan bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhanita, S. (2013). Pengembangan Batik Jambi Motif Sungai Penuh sebagai Bentuk Kontribusi pada Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 9(4), 381–392.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Bahana, A. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 153–165. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21783/20118>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. (2020). *Statistik Jumlah Penduduk Kota Semarang*. <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-12-0>
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*. Gaya Media.
- Kementerian Pekerjaan Umum RI. (2010). *Modul Pengolahan Sampah Berbasis 3R*. Kementerian Pekerjaan Umum.
- Kementerian Pekerjaan Umum RI. (2017). *Petunjuk Teknis TPS 3R*.
- Purnaweni, H. (2017, February 21). Bom Waktu Sampah. *Suara Merdeka*, 4. https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_02_21-hal.04_Bom-Waktu-Sampah.pdf
- Rahmayani, Chanidia Ari, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 18–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10231>
- Setiadi, Rukuh, Moh Nurhadi, dan F. P. (2020). Idealisme dan Dualisme Daur Ulang Sampah di Indonesia: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 48–57.
- Setiadi, R. (2020). *Tiga kendala ini sebabkan rendahnya upaya pemilahan sampah di Indonesia*. <https://theconversation.com/tiga-kendala-ini-sebabkan-rendahnya-upaya-pemilahan-sampah-di-indonesia-132682>
- Shahnaz Dyah Purwanto, R. S. S. (2018). Evaluasi Program Pencatatan Angka Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 285–298. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21994>
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Syafie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Wicaksono, I., & Warsono, H. (2020). Manajemen Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota

Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 248–262.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27358>